

Ijime, Mentsu, dan LGBTQIA+ dalam Film Monster (2023): Kajian Hegemoni Gramsci

Ajeng Aisyah Fitria¹, Ardian Nugraha Priyatama²

^{1,2}*Departemen Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281*

Received: 10-12-2024; Revised: 23-01-2025; Accepted: 05-02-2025; Published: 06-02-2025

Abstract

*Homogeneous Japan is the source of several problems that have yet to be solved, one of which is bullying. The amount of bullying that occurs, especially in schools, causes many students to be depressed and even commit suicide. These harmful things are then represented in a film titled *Monster (2023)*. In this paper, there are two research questions, namely 1) how does the government dominate and hegemonies society so that the concept of homogeneity and *mentsu* can crystallise in Japan? 2) what is the relationship between the discourses of LGBTQIA+, *ijime*, and *mentsu* that appear in the film? Antonio Gramsci's theory of hegemony is used with a qualitative method to dissect the film. This research discovered that the film attempts to voice the discrimination received by LGBTQIA+ people in Japan by portraying them as two boys who fall in love and yearn for freedom. The societal pressure that considers them different due to the hegemony of the homogeneous concept of Confucianism leads to *ijime*. This is exacerbated by the *mentsu* in society, which has a reciprocal relationship. LGBTQIA+ people therefore have no space in conservative Japanese society and so the film was produced to emancipate freedom for subaltern LGBTQIA+ people.*

Keywords: *ijime; mentsu; LGBTQIA+; hegemony; Antonio Gramsci*

1. Pendahuluan

Budaya didefinisikan sebagai pola makna yang ditransmisikan secara historis dan diwujudkan dalam bentuk simbol, sebuah sistem konsepsi yang diwariskan dan diekspresikan dalam bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan tentang kehidupan (Geertz, 1973:89). Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa budaya merupakan simbol-simbol yang diwariskan pada suatu masyarakat hingga menjadi identitas dalam diri mereka. Dalam hal ini, konsep mengenai keseragaman di Jepang menjadi identitas yang secara disadari maupun tidak mengakar kuat pada kehidupan masyarakatnya.

Sebelum membahas konsep tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai suatu peribahasa Jepang, yaitu *deru kugi wa utareru* yang berarti “paku yang mencuat akan dipalu”. Peribahasa ini mengajarkan bahwa Jepang menerapkan keseragaman dalam masyarakatnya sehingga apabila ada yang berbeda maka akan “dipalu” dengan cara merundung atau *ijime* (Koide, et.al., 2019:273-274). Krisis perundungan tersebut sampai saat ini masih terjadi dan

¹ *Corresponding Author. Email: ajengaisyah00@mail.ugm.ac.id
Telp. +62 857-7969-9748*

bahkan jumlahnya meningkat di sekolah-sekolah di Jepang. Dikutip dari The Mainichi (2023) bahwa pada tahun 2023, jumlah kasus perundungan meningkat 10,3% di sekolah dasar dan 13,8% di sekolah menengah pertama. *Ijime* rata-rata terjadi secara berkelompok dan terkadang melibatkan seluruh kelas dengan didukung 'struktur empat lapis' yang terdiri dari korban, pelaku *ijime*, penonton, dan pengamat (Morita & Kiyonaga, 1994 dalam Yoneyama & Asao, 2003:319).

Konsep mengenai homogenitas tersebut nyatanya tidak hanya membuat sejumlah siswa menderita melainkan juga membuat kaum-kaum yang dianggap tabu oleh masyarakat konservatif Jepang, seperti LGBTQIA+, mendapatkan diskriminasi dari berbagai kelompok penentangannya karena dianggap berbeda (Ryousuke, et.al., 2017:48). Hal ini diperparah karena adanya konsep *mentsu*, yaitu citra sosial individu tentang sejauh mana mereka memenuhi peran sosial yang diberikan kepada mereka (istilah peran sosial di sini digunakan secara luas yang juga mencakup peran gender) (Lin & Susumu, 2008:343). Dengan adanya *mentsu* tersebut, orang Jepang akan selalu menjaga citra dirinya sehingga tidak menentang *ijime* yang terjadi. Oleh karena itu, untuk memperlihatkan betapa merugikan dan mengerikannya diskriminasi yang terjadi di masyarakat, yang bahkan sampai membuat seseorang depresi dan bunuh diri, beberapa pihak mencoba mempresentasikan keadaan tersebut dalam bentuk film, seperti film berjudul *Monster* (2023).

Film tersebut bercerita mengenai dua anak laki-laki bernama Minato Mugino dan Yori Hoshikawa yang mencoba untuk lari dari adanya perundungan dengan tidak memperdulikan konsep mengenai persamaan yang berlaku dalam masyarakat. Cerita dimulai dengan Saori Mugino, ibu dari Minato, yang menyadari perilaku aneh anaknya. Atas dasar perkataan anaknya bahwa ada guru yang menindasnya, maka Saori segera melaporkan hal tersebut ke sekolah. Tetapi ternyata dia hanya mendapatkan permintaan maaf dan pihak sekolah terkesan menutup-nutupi. Hal tersebut berujung pada Pak Hori yang dikeluarkan dari sekolah untuk melindungi nama baik sekolah. Flashback ditunjukkan dari sudut pandang Pak Hori yang melihat Minato berlaku kasar pada teman-temannya hingga dia menganggap bahwa Minato merupakan pelaku *ijime* (*bullying*). Flashback kedua ditunjukkan dari sudut pandang Minato yang mulanya merasa iba kepada Yori yang dirundung karena dia feminin. Setelah bersama dengan Yori dalam waktu yang cukup lama, Minato merasa “suka” dengan Yori. Film ditutup dengan adegan Minato dan Yori yang keluar dari gerbong kereta dan berlarian di ladang.

Untuk mengetahui mengenai masalah penelitian, maka film *Monster* (2023) yang mengangkat wacana LGBTQIA+ dihubungkan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, yaitu adanya hegemoni konsep keseragaman. Oleh karena itu, masalah yang tampak adalah 1) bagaimana pemerintah mendominasi dan menghegemoni masyarakat sehingga konsep homogen dan *mentsu* tersebut dapat mengkristal? 2) bagaimana hubungan antara wacana LGBTQIA+, *ijime*, dan *mentsu* yang dimunculkan dalam film? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai hasil telusur pustaka yang ditemukan.

Dari telusur pustaka ditemukan beberapa penelitian yang menggunakan film *Monster* (2023) sebagai objek penelitian. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andrawina (2024) membahas mengenai konstruksi gender yang dibangun dalam film melalui simbol-simbol teks digital yang terkandung di dalamnya menggunakan model semiotika Ferdinand de Saussure. Hasilnya adalah konstruksi dianggap sebagai konsep yang elastis. Meskipun demikian dalam konstruksi tersebut, laki-laki tetap dianggap sebagai sosok dominan dan perempuan menjadi objek diskriminasi. Selain itu, terdapat pula konsep androgini sebagai identitas gender. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, et.al., (2024) menggunakan teori semiotika John Fiske, dengan tiga level makna yaitu level realitas, level representasi, level ideologi. Hasilnya menunjukkan adanya tiga masalah sosial yang diangkat, yaitu ironi birokrasi pendidikan,

bullying, dan homoseksual. Ketiga, penelitian Lestari, et.al., (2024) yang membahas mengenai makna “monster” dari sudut pandang orang tua dan guru dalam film tersebut dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Hasilnya adalah makna kata “monster” mengacu pada pandangan seseorang dalam melihat sifat manusia lainnya dalam persepsi negatif.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, sayangnya belum ada penelitian yang memasukkan konsep-konsep Jepang. Rata-rata analisis dilakukan dari sudut pandang orang Indonesia. Padahal film tersebut menjadi representasi konsep dan budaya Jepang yang harus dianalisis dari kacamata Jepang. Selain itu, belum ada pula penelitian yang menghubungkan antara fenomena yang terjadi dengan dominasi dan hegemoni pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba membedah film tersebut dengan menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci tanpa mengabaikan konsep-konsep serta budaya Jepang di dalamnya.

Dominasi dan hegemoni adalah dua konsep yang berbeda, tetapi dapat berjalan beriringan sebagai landasan awal terbentuknya masyarakat dan budaya. Dominasi merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat memaksa dan seringkali melibatkan tindakan kekerasan, sementara hegemoni merupakan kekuasaan yang halus dan terkadang tidak tampak secara langsung (Gramsci, 1999:145; Patria & Andi, 2015:118). Dari perspektif Marxis tentang kelas, hegemoni dipahami dalam konteks relasi produksi dan ekonomi yang berlandaskan struktur atau kelas sosial. Sementara itu, teori pasca-Marxis memperluas pandangan ini dengan tidak hanya menyoroiti hegemoni berdasarkan hubungan produksi dan ekonomi, tetapi juga melalui wacana yang mengandung kekuatan ideologis dan menjadi bagian dari kekuasaan yang lebih besar (Salam, 2021:213).

Keberadaan struktur dalam masyarakat atau stratifikasi tersebut menciptakan kesenjangan antara kelas dominan dan kelas subordinat. Kondisi ini membentuk negara yang berkuasa atas dominasi dan hegemoni, termasuk hubungannya dengan negara-negara lain (Patria & Andi, 2015:116). Kelas sosial dalam suatu negara mencapai supremasi atau keunggulan dengan dua cara, yaitu melalui paksaan atau dominasi serta melalui kepemimpinan yang mengedepankan intelektual dan moral (Gramsci, 1999:315). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kelas yang lebih kuat, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut mempengaruhi dan menentukan ideologi kelas yang berada di bawahnya. Dalam hubungan antara penguasa dan rakyat, hegemoni berperan dalam mendukung keberlangsungan kekuasaan penguasa.

Berdasarkan hegemoni tersebut, Femia (dalam Hendarto, 1993:82-84) berpendapat bahwa terdapat tiga tingkatan hegemoni, yaitu hegemoni integral atau total, hegemoni yang merosot, dan hegemoni minimum. Hegemoni integral merujuk pada keadaan kesatuan penuh antara kelompok yang mendominasi dan yang didominasi (masyarakat mendukung negara). Kemudian dalam hegemoni yang merosot atau *decadent hegemony*, mulai muncul perpecahan atau ketidaksatuan dari kelompok yang didominasi dan diwujudkan melalui konflik tersembunyi. Pada tingkat terendah, yaitu hegemoni minimum (*minimal hegemony*), pihak-pihak yang lemah mulai bertindak bertentangan dengan kepentingan kelompok dominan. Meskipun hegemoni berperan penting dalam menjaga kekuasaan, dominasi tetap dibutuhkan dalam menjalankan suatu negara. Gramsci menyebut konsep ini sebagai negara integral atau negara yang diperluas yang memiliki dua elemen utama, yaitu alat-alat kekerasan (*means of coercion*) dan alat penegakan kepemimpinan hegemonis (*means of establishing hegemonic leadership*), seperti agama, pendidikan, dan lain-lain (Patria & Andi, 2015:144). Oleh karena itu, negara integral juga disebut sebagai hegemoni yang dilindungi oleh aparat kekerasan.

Dalam kaitannya dengan budaya, pada mulanya dominasi terjadi dari penguasa terhadap rakyat dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Dominasi tersebut ditunjukkan pada

pembentukan hukum yang berlaku sebagai alat yang memaksa masyarakat untuk patuh. Kemudian, agar dominasi tersebut tidak runtuh, maka ideologi-ideologi pemerintah disebarakan secara halus lewat agama, pendidikan, dan lain-lain. Dengan penyebaran tanpa paksaan tersebut terbentuklah kondisi ketika masyarakat terhegemoni sehingga tidak sadar bahwa mereka ikut mendukung kekuasaan pemerintah.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menggunakan data berupa kata-kata atau deskripsi untuk memahami peristiwa, perspektif, fenomena sosial, dan lain-lain. Untuk mendapatkan data, digunakan metode simak, yaitu dengan menyimak secara cermat objek material (film *Monster* (2023)) yang merepresentasikan mengenai konsep-konsep budaya serta hubungannya dengan LGBTQIA+. Kemudian untuk memperkuat argumen digunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik tinjauan pustaka, yaitu dengan membaca berbagai penelitian maupun buku berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya Jepang. Kedua data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori hegemoni Antonio Gramsci agar membentuk sebuah argumen yang terterima dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian hasil dan pembahasan, pertama akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai temuan-temuan yang didapatkan dalam film *Monster* (2023). Kemudian temuan-temuan tersebut dihubungkan dan dianalisis menggunakan teori hegemoni Gramsci serta diperkuat dengan konsep-konsep dalam budaya Jepang.

3.1 *Ijime*, *Mentsu*, dan LGBTQIA+

3.1.1 *Ijime*

Korban *ijime* atau perundungan dalam film tersebut adalah tokoh Yori Hoshikawa yang dirundung oleh teman-temannya. Bentuk-bentuk *ijime* yang ditampilkan dalam film tersebut, yaitu mendorong, mengotori meja, menghina, menyembunyikan sepatu, dan mengunci di toilet. Pada menit 78.45 Yori didorong temannya hingga terjatuh ketika dalam perjalanan masuk sekolah dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah candaan, bahkan Minato yang hanya sekedar bertegur sapa dengan Yori pun ditanyai “kenapa kau berbicara pada alien?”.



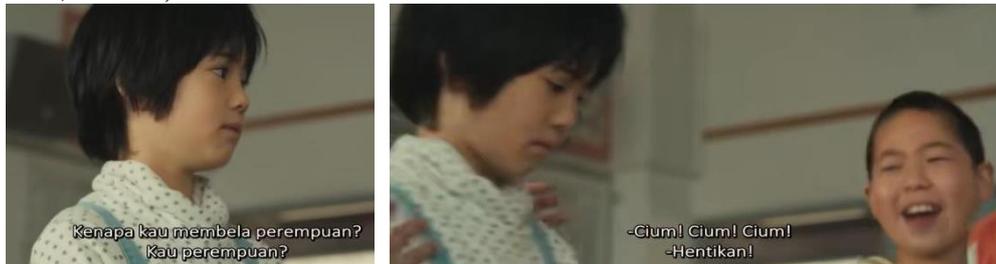
Gambar 1. Yori didorong hingga terjatuh

Tidak hanya didorong, pada menit ke 82.42 meja Yori dikotori dengan berbagai sampah oleh teman-temannya. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan bahwa *ijime* di Jepang tidak hanya dilakukan oleh satu orang melainkan oleh sekelompok orang yang juga ikut mengajak dan secara tidak langsung “memaksa” orang yang tidak ikut merundung, seperti Minato, untuk turut serta dalam aksi perundungan tersebut.



Gambar 2. Minato diajak melakukan *ijime*

Ijime tersebut tidak hanya berhenti ketika Yori membersihkan mejanya, melainkan berlanjut setelah Yori membela Kuroda yang dihina oleh seorang anak laki-laki. Teman-temannya yang lain yang mendengar pembelaan tersebut kemudian terus menghina dengan mengatakan “kenapa kau membela perempuan? Kau perempuan? Alien perempuan? Bibirku sangat elastis!” hingga anak laki-laki tersebut hendak mencium Yori. Teman-teman Yori yang merendahkan Yori atas sifat-sifatnya yang feminin merupakan bentuk seksisme (*sexism*). Seksisme adalah bentuk diskriminasi terhadap suatu individu atau kelompok yang didasari oleh keyakinan bahwa sifat dan posisi individu tersebut lebih rendah dibanding kelompok pelaku (Dewi, et.al., 2022:1).



Gambar 3. Yori dihina oleh teman laki-laknya

Bentuk *ijime* terakhir yang dilakukan oleh teman-teman Yori adalah menguncinya di toilet. Hal tersebut terlihat pada menit 92.52 yang menyebabkan kesalahpahaman antara Pak Hori dengan Minato karena ketika penguncian terjadi terlihat Minato keluar dari toilet. Minato kala itu tidak berani membukakan pintu toilet karena tidak ingin ikut terlibat dengan *ijime* yang terjadi.



Gambar 4. Yori dikunci di toilet

Siksaan yang diterima Yori ternyata tidak hanya dilakukan oleh teman-temannya melainkan oleh ayahnya sendiri. Di depan Pak Hori, gurunya, Yori disebut sebagai otak babi dan anak yang nakal. *Scene* tersebut terjadi pada menit 57.14 dengan ayah Yori yang berkata demikian, “aku yakin dia sulit diatur. Kau tak perlu mengajarku tentangnya. Biar aku saja yang atur. Dia monster. Otaknya bukan otak manusia, itu otak babi. Itulah kenapa aku berencana untuk mengubahnya kembali menjadi manusia”. Bahkan pada menit 107.55 ketika Yori mengatakan berbohong atas pernyataannya menyukai perempuan, ayahnya langsung menarik Yori masuk dan terdengar teriakan-teriakan Yori seperti sedang disakiti.



Gambar 5. Ayah Yori menghina anaknya

Ijime yang dilakukan oleh ayah maupun teman-temannya berdampak pada kesehatan mental Yori. Kejadian yang berlangsung sejak lama dan dilakukan oleh orang terdekat menyebabkan Yori ikut membenarkan wacana-wacana yang ditanamkan kepadanya, seperti pada menit 80.43 Yori menganggap dirinya kotor dan memiliki penyakit, bahkan dia mengakui bahwa otaknya adalah otak babi. Ketika Yori memberikan permen pada Minato, dia berkata “aku tidak menyentuhnya jadi itu bersih. Kau bisa tertular penyakitku”. Kemudian Minato bertanya, “penyakit apa?” dan Yori menjawab bahwa dia sudah pernah mengatakannya. Jawaban tersebut kemudian ditimpali kembali dengan pertanyaan oleh Minato, “apakah otakmu benar-benar otak babi?” dan diamnya Yori adalah jawaban bahwa memang benar dirinya sendiri menganggap memiliki otak babi.



Gambar 6. Yori menganggap dirinya memiliki penyakit

Anggapan tersebut kembali diutarakan pada menit 93.48 ketika Minato dan Yori sedang berbincang di atas gerbong kereta api tua, tempat persembunyian mereka. Ketika itu Minato memberikan masukan kepada Yori untuk melaporkan semua perundungan yang dia terima kepada Pak Hori, tetapi Yori tidak mau karena dia menganggap bahwa otaknya benar-benar otak babi, “sebenarnya aku punya otak babi”. Pernyataan Yori tersebut dibantah oleh Minato. “otakmu bukan otak babi. Ayahmu salah”, tetapi Yori tetap kukuh pada pendiriannya, “ayahku baik, dia berjanji akan menyembuhkan penyakitku. Saat aku sembuh ibu akan kembali”.



Gambar 7. Yori menganggap dirinya memiliki otak babi

Ijime tersebut juga dialami oleh Pak Hori yang dikeluarkan dari sekolah karena dianggap telah merundung muridnya, yaitu Minato. Kasus tersebut menyebabkan dirinya mendapatkan perlakuan buruk dari masyarakat, seperti diolok-olok, dikirim sampah, dan tidak lagi dihormati oleh murid-muridnya. Pada menit 65.11 terlihat ketika Pak Hori diolok-olok dengan sebutan

“otak babi” dan dikirim kantong plastik merah yang kemungkinan berisi sampah, bahkan ketika Pak Hori datang ke sekolah, anak-anak tanpa ragu langsung memanggilnya dengan nama. Hal ini terjadi karena anak-anak tidak ingin dicap berbeda dengan yang lain dan ingin mempertahankan *mentsunya*. Akan tetapi, hal tersebut menyebabkan Pak Hori depresi hingga hampir melakukan bunuh diri.



Gambar 8. Pak Hori dirundung

3.1.2 *Mentsu*

Mentsu atau dapat diartikan sebagai citra diri maupun wajah Jepang. Orang Jepang sangat menjaga pandangan orang lain terhadap dirinya sehingga apabila *mentsunya* jelek karena suatu hal, maka seseorang dapat dengan mudah depresi hingga melakukan bunuh diri. Dalam film *Monster* (2023) terlihat dalam beberapa *scene* yang menunjukkan *mentsu*. Pertama pada menit 53.29 terlihat bahwa Pak Hori tidak diizinkan untuk bertemu dengan Ibu Mugino untuk mengutarakan kejadian yang sebenarnya karena sekolah takut apabila berita tersebut sampai ke komisi edukasi maka seluruh sekolah akan dihukum. Sehingga, seluruh tindakan dari Pak Hori dikontrol oleh pihak sekolah. Kejadian yang paling penting adalah ketika Pak Hori mencoba menghentikan Mugino yang sedang marah akan tetapi tidak sengaja hidung Mugino tersikut oleh Pak Hori. Bukannya memberikan klarifikasi dengan transparan pihak sekolah malah menghindari dan menutup-nutupi seperti dengan pernyataan “terjadi persentuhan fisik yang tidak disengaja terhadap wajah Mugino”. Akibatnya, Ibu Mugino yang tidak terima dengan respon sekolah langsung memanggil pengacara dan menuntut secara resmi kasus ini.



Gambar 9. Sekolah mengontrol Pak Hori

Tindakan kontrol yang dilakukan oleh sekolah kepada Pak Hori tersebut berujung pada pembagian kuesioner kepada murid-murid kelas 5 terkait dengan tindakan Pak Hori. Hal ini terjadi karena Ibu Minato menyewa pengacara sehingga dapat mengancam nama baik sekolah. Dari kuesioner tersebut banyak dari murid yang mengisi jawaban bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan hal-hal yang didikte oleh guru lainnya agar tidak dianggap berbeda. Akibatnya pada menit ke 61.20 diadakan pertemuan dengan wali murid dan Pak Hori diminta untuk mengakui kejahatan yang tidak pernah dia perbuat semata-mata untuk melindungi nama baik sekolah.



Gambar 10. Sekolah mengorbankan Pak Hori

Ketika Pak Hori telah tersandung kasus, Kida, murid perempuan yang menunjukkan bangkai kucing yang diduga dihajati oleh Minato, tidak ingin menjelaskan hal tersebut kepada guru-guru. Bahkan Kida memilih untuk bungkam dan berpura-pura tidak mengerti hal yang telah dia utarakan. Ini semata-mata untuk menjaga nama baiknya dari teman-teman perempuannya. Karena apabila Kida memiliki hubungan yang baik dengan Pak Hori, bahkan sampai membelanya, maka dia akan mendapatkan perlakuan yang sama.



Gambar 11. Kida yang berpura-pura

Kemudian, ketika Pak Hori dikeluarkan dari sekolah dengan *mentsu* yang sangat buruk di masyarakat, membuat kekasihnya pergi darinya. Pada menit 64.11 terlihat bahwa kekasihnya meninggalkan dirinya karena merasa takut ikut tersangkut masalah dan *mentsunya* menjadi buruk. Padahal kekasihnya tersebut mengetahui bahwa Pak Hori tidak bersalah. Dengan demikian, *mentsu* yang buruk dapat menyebabkan seseorang didiskriminasi oleh sosial yang bahkan tidak peduli apakah orang tersebut benar atau salah. Masyarakat hanya mengikuti wacana besar yang beredar.



Gambar 12. Kekasih Pak Hori meninggalkannya

Tindakan *mentsu* tersebut juga dilakukan oleh kepala sekolah yang telah menabrak cucunya hingga meninggal ketika sedang memarkirkan mobil. Untuk melindungi reputasinya sebagai kepala sekolah yang baik, maka kasus tersebut dilimpahkan pada suaminya hingga suaminya berakhir di penjara. Kepala sekolah yang seharusnya bersifat lemah lembut dengan tega menjebloskan suaminya ke penjara dan bahkan pada menit ke 24.37 kepala sekolah dengan tega menjegal seorang anak kecil yang sedang berlarian di supermarket. Tidak hanya itu, pada menit ke 53.49 kepala sekolah sengaja memasang fotonya dengan cucunya sebelum bertemu

Ibu Minato agar *image* bahwa dia mencintai cucunya yang telah meninggal dapat terlihat. Oleh karena itu, anggapan bahwa kepala sekolah baik menjadi diragukan.



Gambar 13. Kepala sekolah memasang foto bersama cucunya

Kasus Pak Hori tersebut ternyata merupakan kebohongan yang dilakukan oleh Minato. Hal ini terlihat pada menit ke 110.05 ketika Minato mengaku kepada kepala sekolah bahwa Pak Hori tidak bersalah. Bohongnya Minato tersebut ternyata berkaitan dengan perkataan Yori pada menit 93.48 ketika Minato memberikan saran agar Yori melaporkan perundungan tersebut kepada Pak Hori, tetapi ditolak oleh Yori dengan alasan bahwa Pak Hori akan menganggap dirinya tidak bertindak seperti manusia. Oleh karena itu, untuk melindungi Yori dari anggapan buruk sekaligus sebagai alibi Minato pada ibunya (untuk menutupi tindakan aneh maupun sikap depresinya), Minato melakukan fitnah agar *mentsunya* tetap terjaga dan ada pihak lain yang dikorbankan.



Gambar 14. Yori takut dianggap buruk

3.1.3 LGBTQIA+

Wacana mengenai LGBTQIA+ dalam film ini disampaikan secara tersirat. Wacana tersebut pertama kali terlihat ketika Pak Hori secara tidak sengaja menumpahkan air pada kertas tugas Yori di apartemennya. Ia kemudian membersihkan dan membacanya hingga menemukan sandi dari nama kedua anak tersebut, yaitu Minato Mugino dan Yori Hoshikawa. *Scene* selanjutnya berganti sudut pandang ke Minato yang pada mulanya merasa iba dengan Yori yang mengalami perundungan. Kedekatan mereka membuat Yori mengajak Minato ke tempat persembunyiannya. Semakin lama Minato bersama Yori semakin perasaannya tidak menentu hingga dirinya sempat marah dan sedih ketika Yori berkata akan pindah sekolah ke tempat neneknya. Bahkan Minato berulang kali berkata bahwa dia tidak bisa menjadi seperti ayahnya. Pada menit 107.55 Minato yang mendatangi rumah Yori melihat Yori didampingi oleh ayahnya berkata, “aku sudah sembuh”. Kemudian ayahnya menimpali dengan “kau suka seorang perempuan di dekat rumah nenek kan?” dan dibalas anggukan oleh Yori. Akan tetapi, sesaat setelah pintu rumah ditutup, Yori membuka pintu dan berkata bahwa dia hanya berbohong. Kemudian terdengar suara teriakan Yori yang sepertinya disiksa oleh ayahnya.



Gambar 15. Yori mendapat tekanan dari ayahnya

Wacana tersebut kemudian diperkuat dengan pengakuan Minato pada kepala sekolah pada menit 112.20, “aku tak yakin. Tapi aku menyukai seseorang. Aku tak bisa bilang siapa pun, jadi aku bohong. Karena mereka tahu aku tak akan bisa bahagia”. Pandangan sosial yang menekankan bahwa hal-hal mengenai LGBTQIA+ tersebut tidak normal membuat Minato melakukan kebohongan-kebohongan, termasuk menuduh Pak Hori bersalah. Anggapan ketidaknormalan itu akhirnya menekan kedua anak laki-laki tersebut hingga mereka memilih untuk bersembunyi di markas rahasia mereka. Markas tersebutlah yang pada akhirnya menjadi saksi meninggalnya dua anak laki-laki ini.



Gambar 16. Minato mengakui perasaannya

3.2 Hegemoni: dari Konfusianisme sampai LGBTQIA+

3.2.1 Ideologi Konfusianisme yang Menghegemoni

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa hegemoni adalah kekuasaan yang halus, tidak terlihat, dan tanpa paksaan sehingga cara paling mudah menghegemoni suatu masyarakat adalah melalui agama dan pendidikan. Dalam hal ini ideologi Konfusianisme dianggap “telah menghegemoni” masyarakat Jepang. Konfusianisme merupakan suatu aliran filosofi dari Tiongkok yang “diimpor” ke Jepang karena ideologinya mendukung keberlangsungan pemerintahan feodal (pemerintahan Tokugawa) dengan membenarkan struktur sosial hierarkis serta menekankan nilai-nilai kesetiaan dan kepatuhan pada pihak yang diperintah (Nakai, 1980:157). Pembeneran struktur sosial tersebut merupakan upaya untuk memperkuat negara, yaitu masyarakat diatur sedemikian rupa untuk memenuhi fungsi dan tugas sesuai dengan pangkat masing-masing sehingga sangat sulit untuk melakukan lompatan kelas.

Nilai-nilai Konfusianisme yang sesuai dengan pemerintah menjadikan keberlangsungan aliran tersebut terus diterapkan secara masif oleh pemerintah Tokugawa melalui politik dengan kata lain melalui jalur dominasi atau paksaan. Oleh karena itu, Konfusianisme bagi rakyat bukanlah suatu aliran yang dipilih atas kemauan mereka sendiri melainkan suatu aliran yang dipaksa untuk diikuti hingga lama-kelamaan menjadi bagian dari paradigma struktural yang tidak disadari. Selanjutnya untuk memperkuat dominasi pemerintah, aliran ini pada pemerintahan Meiji dimasukkan ke masyarakat secara halus melalui jalur hegemoni, yaitu menjadi alat pendidikan nasional yang dipopulerkan oleh pemerintah, sekaligus bercita-cita untuk mengikuti modernisasi Eropa (Miyagi Kimiko dalam Takahiro, 2018:89).

Konfusianisme yang dijadikan sebagai alat pendidikan tersebut tentunya memperkuat hegemoninya di masyarakat, dari yang dahulu dipaksakan oleh dominasi pemerintah lama-kelamaan aliran ini menghegemoni secara total di masyarakat baik melalui sistem kepercayaan maupun pendidikan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah, baik dari zaman Edo sampai sekarang, menciptakan negara integral, yaitu dengan adanya alat penegak kepemimpinan hegemoni seperti aliran Konfusianisme yang masuk dalam pendidikan dan kepercayaan didukung dengan adanya alat-alat kekerasan, seperti undang-undang yang keduanya bertujuan untuk mendukung status quo. Untuk lebih jelasnya salah satu contoh dari adanya Konfusianisme adalah *filial piety* yang akan dijelaskan dalam sub sub-bab selanjutnya.

3.2.2 *Filial Piety* sebagai Nilai Pokok dari Konfusianisme

Filial piety merupakan salah satu nilai pokok dalam Konfusianisme karena rasa hormat, kepatuhan, dan kasih sayang terhadap orang tua maupun leluhur dari seorang anak merupakan basis moral dari harmoni keluarga dan masyarakat. Pemerintahan Tokugawa mengimani dengan sungguh-sungguh konsep ini dan pada beberapa reformasi abad ke-18 terutama tahun 1782, kewajiban berbakti kepada orang tua secara resmi dikodifikasikan pada hukum *keshogunan* (Nakabayashi, 2024:14). Mulai abad ke-18, terdapat hukum yang mengatur hadiah bagi orang-orang yang melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua, dan hukuman bagi yang meninggalkan kewajiban tersebut. Hukuman-hukuman tersebutlah yang menjadi alat-alat kekerasan pada negara integral yang pada akhirnya memperkuat hegemoni yang terjadi.

Konsep *filial piety* ini menekankan kesetiaan terhadap ayah (kepala unit keluarga), terhadap *daimyo* dan *shogun* (figur ayah dari klan dan *keshogunan*), dan terhadap kaisar (figur ayah seluruh Jepang) agar tercapai harmoni yang kolektif. Kegagalan untuk melaksanakan *filial piety* adalah sanksi sosial seperti dicemooh maupun dihukum sesuai keputusan *gonin-gumi* (perkumpulan lima keluarga). Konsep ini tidak ditinggalkan pada zaman modern, karena pada era Meiji juga dikodifikasikan pada hukum sipil tahun 1896, hubungan antara orang tua dan anak harus tetap terjaga agar tercipta stabilitas ekonomi antar generasi (terutama kaitannya dengan hukum waris). Dikarenakan terdapat norma sosial dan legal yang mengikat, nilai *filial piety* ini menjadi terinternalisasikan di setiap individu masyarakat Jepang sampai sekarang.

Wujud dari *filial piety* yang bisa kita lihat di Jepang saat ini adalah senioritas pada setiap komunitas yang ada di Jepang. Orang yang lebih tua dan berpengalaman lebih lama dihormati oleh semua orang. Seperti pada budaya *nomikai* (pesta minum-minum), *kouhai* atau junior akan menuangkan minuman atau mengambilkan makanan untuk *senpai*nya. Kemudian masyarakat Jepang tidak senang dengan konfrontasi, sehingga sangat jarang ada yang melawan keputusan atasan yang lebih tua dalam sebuah perusahaan atau institusi padahal para member senior seringkali rigid dan terpaku pada tradisi sehingga terjadi stagnasi. Dalam dunia korporat Jepang, prinsip-prinsip konfusianisme seperti penghormatan terhadap hierarki dan hubungan yang harmonis menyebabkan langgengnya senioritas dalam perusahaan bahkan melahirkan praktik seperti *amakudari* (Vaszkun & Saito, 2021). Konsep *giri* dan *ongaeshi* (tugas dan balas budi) mengakibatkan para senior terutama pejabat instansi pemerintah menjadi sangat dicari ketika pensiun, karena wajah atau *mentsu* mereka serta *network* kenalan-kenalan yang berhutang budi kepada para pejabat ini akan memberikan keuntungan yang tinggi bagi perusahaan. Selain itu, pentingnya keharmonisan dalam badan perusahaan menyebabkan para senior yang stagnan menjadi sulit dipecah karena *giri* dan *filial piety* para bawahannya yang menuntut mereka untuk patuh dan taat walaupun memiliki pandangan yang berbeda dan/atau lebih modern. Hal ini juga terjadi pada film *Monster* dimana kepala sekolah yang sangat apatis dan kolot tetap didukung oleh guru dan staff bawahannya walaupun cara-cara yang digunakan untuk menangani konflik malah membuat situasi memburuk.

3.2.3 Peran Ideologi Konfusianisme dalam Pendidikan Era Modern Jepang

Walaupun Jepang Modern sudah beralih kiblat ke pendidikan gaya barat, prinsip-prinsip Konfusianisme seperti loyalitas, bakti, dan harmoni tetap mengakar pada budaya dan sistem pendidikan pasca Restorasi Meiji. Orang-orang yang pada awal era Meiji ditugaskan untuk belajar dan menerjemahkan cara berpikir politik, teologi, sains, dan filosofi dari Eropa, masing-masing dari mereka fasih dalam literatur Cina klasik (O'Dwyer, 2022:xix). Para bangsawan dan ekonom yang ditugaskan oleh Kaisar untuk belajar ke Eropa dulunya adalah samurai dan kelas pedagang atau petani yang telah menempuh pendidikan zaman Edo yang kaya akan literatur lama dari Cina dan Jepang yang menekankan banyak konsep-konsep Konfusianisme. Cara berpikir Konfusianisme ini mempengaruhi interpretasi dan penerjemahan pola pikir Eropa oleh para utusan yang menghasilkan modernisasi pendidikan Jepang tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai moral dari tradisi yang ada.

Salah satu dari nilai-nilai Konfusianisme yang diajarkan adalah konsep “*ryōsai kenbo*” yang mengatur peran gender di masyarakat Jepang modern menekankan harmoni keluarga akan menghasilkan stabilitas sosial. Pendidikan pada saat itu mengajarkan agar perempuan harus menjadi “istri yang baik, dan ibu yang bijak”. Artinya, istri harus patuh terhadap suami, tetapi juga berpendidikan dan cerdas agar dapat mendidik anak sebagai penerus generasi selanjutnya. Suami harus bekerja dengan baik dan berkontribusi bagi masyarakat agar dapat menafkahi keluarganya, dan istri harus mengurus rumah dan mendidik anak dengan baik agar besok bisa menjadi anak yang loyal terhadap negara. Selain itu, *kokumin doutoku* (moral warga negara) juga menjadi pokok bahasan wajib baik di sekolah, surat kabar, radio, maupun pendidikan ibu-ibu dalam asosiasi istri cinta negara (*aikoku fujinkai*) (O'Dwyer, 2022:77).

Dalam *fujinkai*, para ibu dituntut untuk mengajarkan nasionalisme, dan rasa kesetiaan serta persatuan terhadap negara (*chuukou ippon*). Mereka adalah penggerak utama masyarakat ketika negara membutuhkan, seperti penggalangan dan penyaluran bantuan ketika gempa dan kebakaran besar Kanto 1923. Lalu pada tahun-tahun menuju perang dunia II, adalah para *fujinkai* yang mengetuk rumah ke rumah untuk mobilisasi wajib militer. Para istri yang tergabung dalam *fujinkai* mengantarkan surat perintah wajib militer, dan mempersuasi dengan paksa agar para laki-laki baik dewasa maupun muda, untuk ikut berperang dan “menagih” kesetiaan mereka terhadap kaisar. Para keluarga yang tidak taat terhadap perintah negara akan dicemooh, dan dipaksa untuk menyerahkan laki-laki mereka. *Fujinkai* juga bekerja sama secara erat dengan *kempeitai* atau polisi militer, mereka mengumpulkan data terhadap orang-orang yang tidak patriotis, menolak wajib militer, maupun individu-individu yang dicurigai sebagai mata-mata.

Peran wanita pada Era Meiji sampai paruh awal Showa sangatlah besar dalam membentuk keluarga yang tunduk terhadap hegemoni negara, sesuai dengan tujuan restorasi Meiji untuk mempersatukan negara dan memperkuat lagi kesetiaan masyarakat terhadap kaisar. Kesadaran kolektif mengenai kepatuhan yang dibentuk sejak era Tokugawa dan ditempa berulang-ulang sampai awal era Showa semakin memperkuat peribahasa *deru kugi wa utareru* (paku yang mencuat akan dipukul). Apalagi, perbedaan dan ketidaktaatan pada era-era tersebut mengakibatkan konsekuensi yang fatal. Dari kedua pembahasan mengenai Konfusianisme tersebut, ditemukan bahwa Konfusianisme dengan dasar keharmonisan sosial menghegemoni dan menjadi dasar dari pola pikir masyarakat Jepang kini. Salah satu konsep yang menerapkan pola pikir tersebut adalah konsep homogenitas yang kemudian melahirkan konsep-konsep lainnya, seperti *ijime* dan *mentsu*. Kedua konsep tersebut menjadi dasar dalam pembahasan artikel ini dan hubungannya dengan isu internasional, yaitu LGBTQIA+.

3.2.4 Timbal Balik *Ijime* dan *Mentsu*

Representasi *ijime* yang ditampilkan film *Monster* (2023) seperti pada temuan-temuan di atas, berfokus pada *ijime* yang terjadi pada Yori Hoshikawa. Dia dianggap berbeda oleh teman-temannya karena sebagai seorang laki-laki, Yori tampak lebih feminim, menyukai origami, hafal jenis-jenis bunga, dan terlihat selalu bermain dengan anak-anak perempuan. Tentunya hal-hal tersebut dianggap berbeda oleh kebanyakan masyarakat Jepang yang menganggap laki-laki haruslah kuat, suka olahraga, dan berteman dengan sesama laki-laki. Perundungan yang dialami Yori (gambar 1-4) tidak mendapatkan pembelaan dari teman-temannya. Ini terjadi karena apabila teman-temannya ikut membela Yori maka mereka akan dianggap berbeda dan tentunya akan mendapatkan perlakuan yang sama. Minato yang hanya menanggapi ucapan Yori pun ikut terlibat dengan mendapatkan pertanyaan “kenapa kau berbicara pada alien?”. Oleh karena itu, untuk mengamankan citra diri maka mereka hanya bertindak sebagai penonton tanpa memperdulikan hal yang terjadi.

Berbicara mengenai citra diri, maka tidak terlepas dari konsep *mentsu* atau wajah Jepang. Dalam hal ini konsep mengenai citra diri Jepang berbeda dengan penggambaran citra diri di belahan dunia mana pun. *Mentsu* atau wajah Jepang mengacu pada citra publik seseorang bahwa seseorang harus memenuhi peran sosialnya seperti yang diharapkan oleh orang lain. Jadi, apabila mereka gagal dalam memenuhi harapan tersebut, maka orang Jepang akan kehilangan muka (Lin & Susumu, 2008:343). Kegagalan mempertahankan *mentsu* tersebut terlihat jelas pada *scene* setelah Pak Hori dirundung (gambar 8) hingga hendak melakukan bunuh diri. Oleh karena itu, orang Jepang berusaha mati-matian untuk mempertahankan *mentsunya*, seperti ketika tokoh kepala sekolah mengkambinghitamkan Pak Hori demi nama baik sekolah (gambar 9-10) sampai ketika tokoh tersebut melemparkan tuduhan penabrakan cucunya pada suaminya hingga akhirnya dipenjara. Semua itu semata-mata untuk mempertahankan jabatan, kedudukan, serta *mentsu* tokoh kepala sekolah. Semua guru-guru dan staff yang memaksa Hori untuk diam juga menjaga *mentsu* mereka sendiri dengan cara patuh sepenuhnya terhadap kepala sekolah sebagai bentuk *filial piety*. Dalam adegan-adegan di sekolah, tidak terlihat satu pun dari para guru yang menentang kepala sekolah. Mereka merasa bahwa patuh terhadap kepala mereka adalah paling aman, dan melawan atau bertentangan arus membuat mereka “berbeda”.

Dalam kasus di film ini, baik *ijime* maupun *mentsu* memiliki hubungan timbal-balik, yaitu *ijime* menimbulkan *mentsu* begitu pula sebaliknya. Adanya *ijime* yang terjadi pada Yori menimbulkan *mentsu* teman-temannya sehingga tidak ada seorang pun yang membelanya. Kemudian, *mentsu* dari kepala sekolah untuk mempertahankan nama baik sekolah berujung pada pendiskriminasian Pak Hori yang akhirnya juga mendapatkan perilaku tidak mengenakan baik dari muridnya, kekasihnya, maupun sosial yang ikut menghakiminya.

3.2.5 Homoseksual di Jepang dan Hubungannya dengan Wacana LGBTQIA+ dalam Film

Dari bukti-bukti yang ditemukan, yaitu pada gambar 15-16, diduga terdapat penggambaran tersirat wacana LGBTQIA+. Dugaan tersebut kemudian terjawab dari pernyataan Hirokazu Kore-eda, sutradara dari film tersebut diwawancarai oleh The Film Stage mengenai wacana LGBTQIA+ yang diusung oleh film *Monster* (2023) dengan pertanyaan mengenai tafsir hubungan antara kedua anak laki-laki tersebut yang termasuk subteks queer. Dengan tegas Kore-eda menjawab, sebagai berikut.

“In fact, it was written into the plot intentionally. And on top of that, we requested the support of an LGBTQ Japanese organization that came in and gave us seminars on what it was to be queer and what kind of feeling people would feel, what kind of

conflicts. So it was very much intended, right from the time that the script was written”
(Raup, 2023).

Dari pernyataan sutradara tersebut jelas bahwa film ini memang sengaja menampilkan unsur-unsur LGBTQIA+ atau *lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer/questioning, asexual*. Banyak istilah lain (seperti non-biner dan *panseksual*) yang digunakan orang untuk menggambarkan pengalaman mereka tentang gender, seksualitas, dan karakteristik seks fisiologis mereka (La Trobe University, n.d.). Selain itu, dipegangnya film tersebut oleh Toho Entertainmentt sebagai perusahaan produksi memperkuat representasi wacana LGBTQIA+. Hal ini dikarenakan Toho Entertainment didukung oleh investasi dari Blackrock Inc. yang memegang prinsip ESG (*Environmental, Social, & Governance*) dengan mendukung dan menerapkan agenda DEI (*Diversity, Equity, & Inclusion*) dari Amerika pada sepuluh tahun terakhir ini (Blackrock Funds, 2016-2017).

Pengaruh dari Blackrock Inc. yang mengusung prinsip ESG pada media-media di Jepang salah satunya ditunjukkan oleh sebuah game *Guilty Gear* yang menampilkan karakter “trap” bernama Bridget. Maksud dari karakter “trap” adalah Bridget yang seorang laki-laki digambarkan berpenampilan seperti perempuan karena dipaksa oleh ibunya untuk menghindarkan diri dari kesialan. Karakter tersebut memang sengaja dibuat sebagai upaya untuk menampilkan karakter yang imut tapi menjebak, tanpa mengubah gendernya (tetap disebut ‘he’). Akan tetapi, setelah SEGA (perusahaan produksi) mendapatkan investasi dari Blackrock Inc., secara tiba-tiba SEGA melakukan revisi dan menyatakan bahwa karakter tersebut adalah transgender dan disebut dengan pronomina ‘she’. Hal ini memunculkan kontroversi besar dan penentangan baik dari fans yang berasal dari Jepang maupun masyarakat luar negeri.

Kontroversi dan penolakan LGBTQIA+ di Jepang terjadi tidak hanya karena drama performatif yang dilakukan perusahaan-perusahaan media seperti SEGA dan TOHO, akan tetapi juga terjadi karena perbedaan ideologis yang fundamental. Di barat, terutama Amerika, LGBTQIA+ menyebar secara masif sampai pada titik adanya pemaksaan untuk masyarakat harus menerima ideologi tersebut, bahkan topik-topik mengenai perubahan gender dan seksualitas diajarkan ke anak-anak dibawah umur pada sekolah-sekolah dasar dan menengah. Salah satunya adalah dalam buku *Gender Queer: A Memoir* (Kobabe, 2022), sebuah *graphic novel* yang menceritakan kisah seksualitas dari seorang anak muda terhadap pacar laki-laknya. Novel ini menampilkan ilustrasi yang sangat vulgar mengenai masturbasi, hubungan seks sesama jenis, dan fantasi-fantasi menyimpang lainnya yang padahal ditujukan untuk anak-anak dan menjadi salah satu materi di mata pelajaran wajib di sekolah dasar dan menengah di beberapa negara bagian Amerika seperti Ohio, New York, Texas, dan Virginia. Bahkan, negara bagian seperti New York membuat hukum penolakan untuk menggunakan pronomina yang diinginkan oleh seseorang itu merupakan tindakan diskriminasi dan dapat dijatuhi sanksi, seperti pemecatan atau penghentian aktivitas komersial apabila pelakunya adalah anggota dari sebuah badan usaha (NYCHRL, 2018). Hal ini sangat berbeda dengan keadaan masyarakat Jepang yang menjaga harmoni dan ketaatan sosial. Orang-orang di Jepang tidak bisa menuntut orang lain untuk mengikuti kemauannya, justru terkadang malah mengorbankan diri sendiri agar dapat diterima masyarakat (seperti ikut merundung Yori padahal aslinya tidak mau). Ideologi LGBTQIA+ yang memaksa semua orang untuk mengakomodasi keinginan pribadi anggota-anggotanya sangat bertentangan dengan filosofi masyarakat Jepang yang mengutamakan kepentingan sosial di atas kemauan pribadi.

Meskipun demikian, 10 tahun terakhir beberapa daerah di Jepang telah menerapkan peraturan mengenai perlindungan dan dukungan bagi kaum LGBTQIA+ yang dimulai dari tahun 2013 oleh Daerah Yodogawa, Kota Osaka yang menyuarakan mengenai “deklarasi

dukungan” (日本經濟新聞, 2013) sampai dengan lima partai oposisi dan satu fraksi mengajukan RUU penghapusan diskriminasi LGBT ke DPR (The Constitutional Democratic Party of Japan, 2016) yang datanya dapat dilihat dalam website DPR (衆議院, 2016). Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya karena ada perbedaan budaya, maka banyak masyarakat Jepang yang tetap menentang gerakan LGBTQIA+. Sebenarnya, praktik homoseksual di Jepang telah ada sejak zaman Edo dengan istilah *nanshoku* yang memiliki dua model, yaitu model samurai yang terikat dengan filosofi samurai (tugas dan kesetiaan) dan model *kagama* berupa prostitusi laki-laki. Budaya *nanshoku* pada kelas samurai berkembang salah satunya karena tugas mereka yang kebanyakan menetap di kastil atau selalu berpindah medan perang menyebabkan sulitnya akses terhadap prostitusi wanita (yang terkonsentrasi di kota-kota besar saja). Akibatnya, para samurai memuaskan nafsunya terhadap samurai atau prajurit muda yang ada di sekitar mereka. Samurai yang berlokasi di kota-kota besar seperti Edo, Osaka, dan Kyoto lebih memilih para wanita penghibur yang bekerja di rumah-rumah bordil di distrik merah dibandingkan pelacur laki-laki atau *kagama*. *Nanshoku* dan *kagama* dianggap menyimpang karena berbeda dengan prostitusi wanita yang kerap dicatat, sama sekali tidak ada catatan resmi dari keshogunan maupun istana mengenai prostitusi laki-laki (Stanley, 2012:16). Praktik tersebut kemudian mulai dilarang dan dianggap sebagai kejahatan dengan adanya aturan *keikan* dan *hentai seiyoku* sampai dengan tahun 1881 karena Jepang mengikuti misi modernitas Barat (Makoto & Angus, 1994:108-111). Pada Jepang modern, peraturan penetapan kriminalitas terhadap kaum homoseksual tersebut sudah tidak lagi diberlakukan, di satu sisi mulai ada dukungan terhadap kesetaraan dan pengakuan terhadap kaum LGBTQIA+ di masyarakat Jepang. Akan tetapi, di sisi lain, populasi di Jepang yang terus menurun menjadikan suatu keanehan apabila LGBTQIA+ tetap didukung, maka pertanyaannya adalah mengapa film ini dibuat dan merepresentasikan hal tersebut?

Jawaban dari pertanyaan tersebut telah dijelaskan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan perbedaan antara homoseksual di Jepang dan LGBTQIA+ yang berkembang di Barat. Homoseksual di Jepang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat-tempat tertentu, sementara LGBTQIA+ diperlihatkan secara terang-terangan. Oleh karena itu, secara berani film tersebut menggambarkan wacana LGBTQIA+ dalam bentuk hubungan anak-anak seolah-olah digambarkan sebagai kaum yang murni dan polos, tetapi ditekan secara berlapis oleh sosial atau disebut juga subaltern (meminjam istilah Spivak). Atas dasar “terang-terangan” tersebut, maka *society* Jepang menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu perbedaan sehingga melanggar konsep kesamaan yang telah menghegemoni di Jepang. Homogenitas yang merupakan wujud dari hegemoni total Konfusianisme menyebabkan perbedaan menjadi terlarang dan memicu terjadinya *ijime*. Kemudian karena adanya konsep *mentsu* atau menjaga citra diri, maka *ijime* yang terjadi tidak pernah selesai sehingga menimbulkan depresi pada korban. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya diskriminasi pada kaum-kaum yang dianggap berbeda. LGBTQIA+ dalam masyarakat Jepang menjadi isu yang menyimpang dari konsep homogenitas sehingga “kemodernan ala Amerika” tersebut masih mendapat penolakan. Mimpi pembebasan kaum-kaum LGBTQIA+ tersebut pada akhir film digambarkan dengan kedua anak tersebut telah berlarian di padang rumput dengan bebas dan jalan yang dikunci pagarnya telah terbuka lebar.

4. Kesimpulan

Hegemoni sebagai kekuasaan yang tidak terlihat dan tidak disadari oleh masyarakat dengan mudah menyebarkan kekuasaannya lewat agama dan pendidikan. Aliran Konfusianisme yang pada mulanya diimpor oleh pemerintah Jepang (Tokugawa) dari Cina untuk melanggengkan kekuasaannya dan disebar dengan “memaksa” atau dominasi, lama-

kelamaan dihayati dan diterima oleh masyarakat Jepang sebagai sesuatu yang sudah ada. Konfusianisme yang mengajarkan mengenai harmoni sosial, memaksa masyarakat untuk hidup sesuai peran masing-masing, hingga menghegemoni mereka secara total untuk mempertahankan konsep kesamaan sehingga perbedaan menjadi terlarang. Perbedaan yang muncul di masyarakat menimbulkan perundungan (*ijime*) atau upaya untuk “memalu” atau “memukul”. Dalam hal ini adanya konsep *mentsu* atau citra diri membuat setiap individu berlomba-lomba untuk menyesuaikan diri mereka berdasarkan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, terjadinya *ijime* yang biasanya dilakukan secara berkelompok untuk menindas seseorang yang dianggap berbeda, tidak dapat dicegah oleh “penonton” di sekitarnya karena mereka hendak menjaga *mentsunya*.

Hubungan antara *ijime* dan *mentsu* ini tidak terjadi secara searah melainkan timbal-balik, karena untuk mempertahankan *mentsunya* dapat menimbulkan *ijime*. Dalam film, perundungan yang terjadi pada Yori diakibatkan oleh perbedaan yang Yori perlihatkan. Minato yang hendak membantu Yori pun ikut diejek karena menyalahi “suara dominan” sehingga untuk melindungi *mentsu* Yori, alih-alih mengadakan perundungan yang terjadi, Minato malah memfitnah Pak Hori sebagai pelaku perundungan baginya. Pak Hori yang berada di bawah kekuasaan sekolah tidak dapat melawan selain melindungi *mentsu* sekolah hingga mengakibatkan dirinya dirundung oleh masyarakat. Tindakan Minato yang tentu saja sangat merugikan tersebut dilakukan karena dirinya tidak hanya melindungi Yori sebagai seorang teman, melainkan juga sebagai seseorang yang dicintainya. Wacana LGBTQIA+ yang ditampilkan oleh film tersebut dikonfirmasi oleh sutradara dan diperkuat oleh perusahaan produksi, Toho Entertainment, yang ternyata mendapatkan suntikan dana dari Blackrock Inc. yang mendukung nilai-nilai DEI (*Diversity, Equity, & Inclusion*) Amerika.

Representasi wacana LGBTQIA+ dalam film tersebut terjadi karena masih banyak masyarakat Jepang konservatif yang mendiskriminasi kaum-kaum LGBTQIA+ meskipun di beberapa tempat aturan-aturan mengenai penghapusan diskriminasi telah dibuat. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara konsep homoseksual Jepang dengan LGBTQIA+ Amerika yang cenderung lebih terang-terangan. Aksi “terang-terangan” tersebut membuat kaum-kaum LGBTQIA+ tampak “berbeda” sehingga mengganggu keselarasan sosial berupa konsep homogenitas masyarakat yang telah menghegemoni sejak lama. Akibatnya, untuk mempertahankan *mentsu* terjadi *ijime*. Hal inilah yang berusaha dinarasikan dalam film dengan penggambaran dua anak laki-laki yang saling jatuh cinta, bahwa sutradara maupun perusahaan produksi menganggap bahwa kaum-kaum LGBTQIA+ tersebut merupakan kaum yang murni tetapi ditindas dan dihakimi oleh masyarakat secara berlapis (subaltern). Oleh karena itu, pada bagian akhir ditampilkan kedua anak kecil tersebut berlarian dan jalan yang sebelumnya berpagar sudah terbuka yang menandakan impian kebebasan bagi kaum LGBTQIA+.

Referensi

- Andrawina, D. (2024). “Konstruksi Gender melalui Simbol-Simbol Teks Digital dalam Film ‘Monster’ (2023)” (skripsi). Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.
- Blackrock Funds, (2016-2017). “Form N-Q Quarterly Schedule of Portfolio Holdings of Registered Management Investment Company”.

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/844779/000119312516798921/d242254dnq.htm>

- Dewi, F., Puspitasari, D., Stovia, A. (2022). Bentuk Tindakan Seksisme dalam Kumpulan Cerpen Karya Edogawa Rampo. *KIRYOKU*, 6(1), 1-8. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v6i1.1-8>
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books Inc.
- Gramsci, A. 1999. Selections from the Prison Notebooks. London: ElecBook.
- Hendarto, H. 1993. Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kobabe, M., & Kobabe, P. (2022). *Gender Queer: A Memoir*. First edition. Portland: Oni Press.
- Koide, T., et.al. (2019). "Uncovering Inner Dilemmas Experienced by Parents of Multicultural Families in Japan". *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 50, No. 3, pp. 261-284. <https://www.jstor.org/stable/26843178>
- La Trobe University. n.d. "What does LGBTQIA+ Mean?". <https://www.latrobe.edu.au/students/support/wellbeing/resource-hub/lgbtiqa/what-lgbtiqa-means>
- Lestari, E., Abdul K., Farida H. (2024). "Representasi Makna Kata "Monster" dalam Sudut Pandang Orangtua dan Guru pada Film *Monster*". *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3 No. 4, pp. 2094-2101. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.4052>
- Lin, C., dan Susumu Y. (2008). "Japanese Folk Concept of Mentsu: an Indigenous Approach from Psychological Perspectives". In G. Zheng, K. Leung, & J. G. Adair (Eds.), *Perspectives and progress in contemporary cross-cultural psychology: Proceedings from the 17th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology*. <https://doi.org/10.4087/CEZM3471>
- Makoto, F., dan Angus L. (1994). "The Changing Nature of Sexuality: The Three Codes Framing Homosexuality in Modern Japan". *U.S.-Japan Women's Journal*. No. 7, pp. 98-127. <https://www.jstor.org/stable/42772078>
- Nakabayashi, M. (2024). "Legislating Filial Obligations: Property Rights and Filial Piety in Shogunate Japan". CSRDA, University of Tokyo.
- New York City Commission on Human Rights. (2024, 18 Desember). Gender Identity/ Gender Expression: Legal Enforcement Guidance. <https://www.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-identity-expression.page#4>
- Nakai, K.W. (1980). "The Naturalization of Confucianism in Tokugawa Japan: The Problem of Sinocentrism". *Harvard Journal of Asiatic Studies*, Vol. 40, No. 1, pp.157-199. <https://doi.org/10.2307/2718919>
- Nugroho, N.S., Kezia C., Muhammad L.S. (2024). "Analisis Kritik Sosial Pada Film *Monster* 2023 Karya Hirokazu Koreeda". *Kontekstual*, Vol 3, No 1, pp. 21-33. <http://dx.doi.org/10.36448/jik.v3i1.3841>
- O'Dwyer, S. (2022). *Handbook of Confucianism in Modern Japan*. Tokyo: Japan Documents, MHM Limited.
- Patria, N., & Andi A. 2015. *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Raup, J. (2023, 21 November). “Hirokazu Kore-eda on Why Monster is Not Like Rashomon, Queer Storytelling, and Ryuichi Sakamoto”. The Film Stage. <https://thefilmstage.com/hirokazu-kore-eda-on-why-monster-is-not-like-rashomon-queer-storytelling-and-ryuichi-sakamoto/>
- Ryousuke, K., Kim J., dan Sato Y. (2017). 東京大学において LGBT 当者学生が抱える困難とニーズ —フォーカスグループインタビューを用いた質的研究— . 東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化効果 検証センター・研究紀要 (4), 46-59. Tokyo University. <https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/51988/files/CASEER00403.pdf>
- Salam, A. 2021. Hegemonic Formation in Post-Javanese Indonesian Society. *Humaniora*, Vol. 33, No. 3, pp. 212-220. <https://doi.org/10.22146/jh.69793>
- Stanley, A. 2012. *Selling Women: Prostitution, Markets, and the Household in Early Modern Japan*. California: UC Press
- Takahiro, N. (2018). “The Formation and Limitations of Modern Japanese Confucianism: Confucianism for the Nation and Confucianism for the People” dalam Ames & Peter (Eds.). *Confucianisms for a Changing World Cultural Order*. Honolulu: University of Hawai'i Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv3zp05k.9>
- The Constitutional Democratic Party of Japan. (2016, 6 Desember). “野党 5 党1会派がLGBT 差別解消法案を衆院に提出”. https://web.archive.org/web/20190331154931/https://cdp-japan.jp/news/20181205_1153
- The House of Representatives, Japan. (2016). “性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案”. https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19001057.htm
- The Mainichi. (2023, 4 Oktober). “Record-High Truancy, Bullying at Japan Schools: Gov't Survey”. <https://mainichi.jp/english/articles/20231004/p2a/00m/0na/015000c>
- Vaszkun, Balázs & Saito, Takashi. (2021). “Confucius - a Chinese thinker still present in Japan's business practices”. *European J. of International Management*. 1. 1. 10.1504/EJIM.2021.10040320.
- Yoneyama, S., & Asao N., (2003). “Problems with the Paradigm: The School as a Factor in Understanding Bullying (With Special Reference to Japan)”. *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 24, No. 3, pp. 315-330. <https://www.jstor.org/stable/3593327>
- 日本経済新聞, (2013, 2 September). “同性愛など性的少数者に支援宣言 大阪・淀川区自治体で異例”. https://www.nikkei.com/article/DGXNASHC0203O_S3A900C1000000/